



**Raker Nasional dan Sosialisasi Hasil
Munas IV ADPMET**

KEBIJAKAN PENGELOLAAN DANA BAGI HASIL MIGAS

3 Juni 2021



Outline

1. Dinamika Perekonomian Terkini dan Proyeksi Tahun 2021

2. Isu dan. Tantangan

3. Penguatan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah



1

DINAMIKA PEREKONOMIAN TERKINI DAN PROYEKSI 2021



TREN PEMULIHAN PEREKONOMIAN GLOBAL TERUS BERLANJUT

Optimisme masih tinggi, meskipun faktor-faktor risiko tetap perlu diwaspadai



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERKEMBANGAN POSITIF EKONOMI GLOBAL BERLANJUT

Beberapa negara sudah tumbuh positif di Q1 2021, a.l. Tiongkok, AS, Singapura, Korsel, Perancis, Taiwan. Pemulihan di negara-negara lain juga terus menguat meski masih di zona negatif.

PASAR KEUANGAN STABIL

- Volatilitas pasar turun (VIX Index)
- Aliran modal ke EMs masih dalam tren positif

PERDAGANGAN GLOBAL TERUS MEMBAIK

- Baltic dry index konsisten di level tinggi
- PMI Manufaktur April tertinggi sejak 2021
- Permintaan barang mesin & elektronik tumbuh tinggi

HARGA KOMODITAS TERUS NAIK

Harga minyak, CPO, dan batu bara sebagai komoditas utama Indonesia mengalami peningkatan signifikan.

VAKSINASI GLOBAL PROGRESIF & KASUS COVID GLOBAL KEMBALI MENURUN setelah new waves beberapa waktu lalu

RISIKO YANG MASIH HARUS DIWASPADAI

Gelombang baru Covid-19 memaksa beberapa negara melakukan **PENGETATAN RESTRIKSI & MUNCULNYA VARIAN –VARIAN BARU**

AKSES & KECEPATAN VAKSINASI masih belum merata

PROTEKSIONISME

Pertumbuhan ekonomi Q1 2021 di sebagian besar negara **MASIH NEGATIF**.

INFLASI AS terus menguat, bahkan mencapai 4,2% pada April 2021 – menggerus pemulihan dan menambah risiko normalisasi moneter yg cepat

Pemerataan akses atas vaksin harus terus didorong

Solidaritas global harus ditingkatkan untuk membantu negara dengan sumber daya terbatas, demi pemulihan global yang kuat.

Indonesia harus memastikan ekonomi segera pulih dan memperkuat reformasi.



PENGENDALIAN PANDEMI DAN PEMULIHAN EKONOMI JUGA SEDANG TERJADI DI INDONESIA

Konsistensi pengendalian pandemi serta kebijakan yang akomodatif perlu terus dijaga



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Covid-19 di Indonesia Masih Dalam Tren Melandai

Total Kasus	1.803.361	(per 28 Mei)
Sembuh	1.654.557	(94,4%)
Meninggal	50.100	(2,8%)
Kasus Aktif	98.704	(5,6%)
Kasus Harian Rata2 7 hari	5.514	

Vaksinasi diakselerasi

Total Dosis yang sudah diberikan **26,28 juta**
(rank 11th di dunia)

Risiko kenaikan kasus masih pasca libur lebaran. 3M, 3T, PPKM, dan vaksinasi akan terus ditingkatkan

Perekonomian Domestik Terus Menguat

Indeks Keyakinan Masyarakat kembali ke level optimis (**Apr 101,5**) dan jauh melampaui awal pandemi

Aktivitas masyarakat per April terus membaik
Mobilitas masyarakat terus meningkat hingga saat ini

Indeks Penjualan Ritel Maret menguat di tingkat 188, Apr (F) 209

ditopang perbaikan konsumsi mamin, sandang, dan perlengkapan rumah tangga

Penjualan mobil ritel tumbuh 227,6% (yoy) 2,5% (mom)
Indikasi perbaikan tingkat konsumsi kelas menengah

Belanja negara April tumbuh 15,9% (yoy)
Melanjutkan peran sentral dalam menstimulasi pemulihan ekonomi

Konsumsi listrik industri dan bisnis April tumbuh 15,9 dan 20,3% (yoy)

Menunjukkan peningkatan aktivitas produksi

Konsumsi semen April tumbuh 8,6% (yoy)
Melanjutkan tren positif pertumbuhan sejak Maret 2021

PMI Manufaktur April di level ekspansif 54,6
Kembali mencatatkan rekor tertinggi sejak 2011

Ekspor April tumbuh 51,9% (yoy) atau 25,0% (ytd)
Peningkatan signifikan baik produk migas dan non-migas

Impor bahan baku dan barang modal tumbuh 33,2% (yoy) dan 11,6% (yoy)
Untuk pemenuhan kebutuhan ekspansi produksi dalam negeri



KERANGKA KEBIJAKAN PEMULIHAN EKONOMI 2021

1 INTERVENSI KESEHATAN

- **Vaksinasi gratis** → untuk 185,55 juta orang untuk mencapai *herd immunity*
- **Himbauan 3M 3T**
- **Intervensi lainnya** → Fasilitas kesehatan, Alat Pelindung Diri (APD)

Program Perlindungan Sosial

Untuk kelompok usia 40-an terbawah dan kelompok rentan: PKH, Kartu Sembako, BST, BLT DD, Pra Kerja, Diskon Listrik, Subsidi Internet

2 SURVIVAL AND RECOVERY KIT

Menjaga Kesiambungan Bisnis

- Dukungan untuk UKM dan Koperasi
- Program prioritas untuk mendukung penciptaan lapangan kerja

3 Reformasi Struktural

Melalui UU Ciptaker untuk mengatasi berbagai tantangan pembangunan nasional (penyediaan lapangan kerja, pemberdayaan UMKM, reformasi regulasi, pengembangan SWF, Ease of Doing Business, dll.)

**GAME CHANGER
2021**

PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL



AGENDA APBN TA 2021

Percepatan Pemulihan Ekonomi



KEMENTERIAN KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

APBN UNTUK PERCEPATAN PEN

Rp.699,42 T

a

KESEHATAN

Rp.176,30 T

b

PERLINDUNGAN SOSIAL

Rp.157,41 T

c

PROGRAM PRIORITAS

Rp.122,42 T

d

**DUKUNGAN UMKM &
KORPORASI**

Rp.184,83 T

e

INSENTIF USAHA

Rp.58,46 T



DAMPAK POSITIF PEMULIHAN EKONOMI DAN PROGRAM PEN ATAS PENYERAPAN TENAGA KERJA

Percepatan penyerapan tenaga kerja dapat mendorong perbaikan kesejahteraan masyarakat di masa pandemi

TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA

Agustus 2020
7,07% (TPT)
9,77 Jt orang

Februari 2021
6,26% (TPT)
8,75 Jt orang

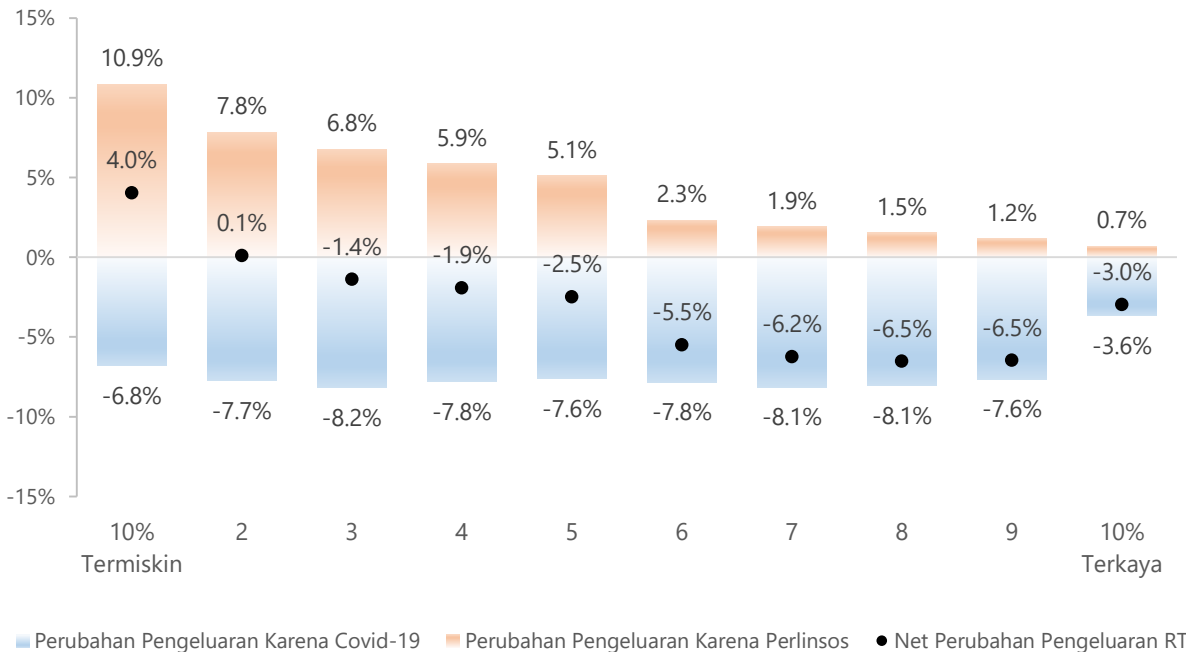
Penurunan Feb 21 thd. Agt 20

0,81 p.p
1.02 jt orang

Pemulihan ekonomi telah menciptakan 2,61 juta lapangan kerja baru dalam kurun Sept 20 – Feb 21
khususnya dari sektor strategis: manufaktur, pertanian, perdagangan, dan jasa penyediaan akomodasi dan makanan minuman

Program Perlinsos PEN 2020 Relatif Tepat Sasaran

Simulasi perubahan pengeluaran rumah tangga dan manfaat perlinsos menunjukkan program perlinsos PEN cukup efektif dalam menjaga tingkat konsumsi rumah tangga miskin dan rentan



Sumber: Perhitungan BKF, atas realisasi berbagai program Perlinsos 2020
Catatan: a) simulasi dilakukan terhadap pertumbuhan konsumsi RT nominal 2020 menggunakan Susenas 2019. b) distribusi Program Perlinsos dilakukan berdasarkan penerima manfaat di Susenas

- Dengan tren pemulihan ekonomi terkini, khususnya dari sisi produksi, serta dukungan stimulus program PEN, laju penyerapan tenaga kerja akan menguat dan tingkat kesejahteraan masyarakat akan segera membaik
- Program Perlinsos PEN mampu menahan kenaikan tingkat kemiskinan dengan menjaga tingkat konsumsi kelompok termiskin.
- Tingkat kemiskinan mampu dikendalikan menjadi 10,19% pada Sept-20. Tanpa program PEN, Bank Dunia memprediksi angka kemiskinan Indonesia 2020 dapat mencapai 11,8%, artinya **PEN 2020 diperkirakan mampu menyelamatkan lebih dari 5 juta orang dari kemiskinan.**
- Tahun 2021, pemerintah berupaya memperkuat efektivitas program perlinsos PEN. Per 18 Mei 2021, program Perlinsos PEN sudah terealisasi Rp.57 T (39% dr pagu) untuk mendukung diantaranya 9,71 jt KPM PKH, 15,93 jt KPM Kartu Sembako, 10 Jt KPM Bansos Tunai, 2,77 juta penerima kartu PraKerja, 3,97 jt KPM BLT Desa, bantuan kuota internet untuk 27,7 jt penerima.

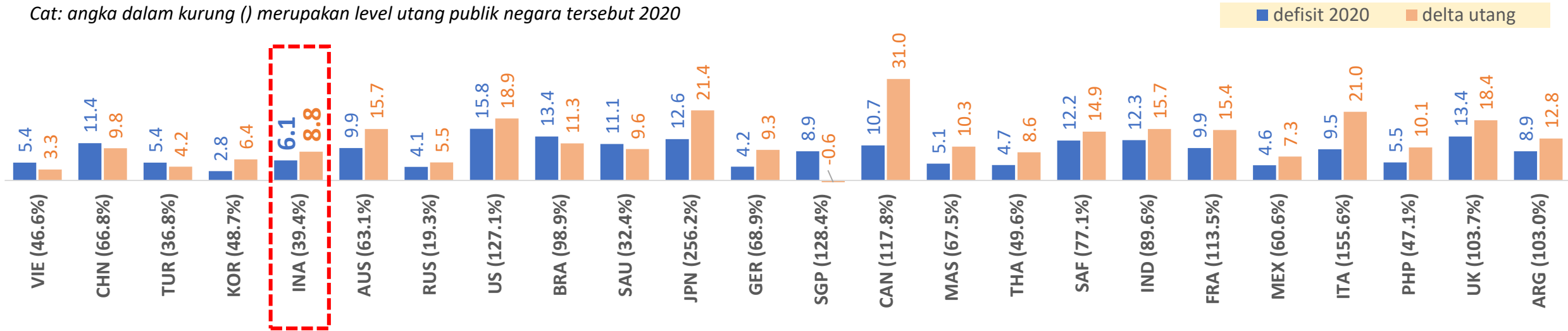
KEBIJAKAN FISKAL INDONESIA EFEKTIF MENAHAN DAMPAK PANDEMI TERHADAP PEREKONOMIAN

Tekanan fiskal dan ekonomi Indonesia relatif moderat di antara kelompok G-20 dan ASEAN-6

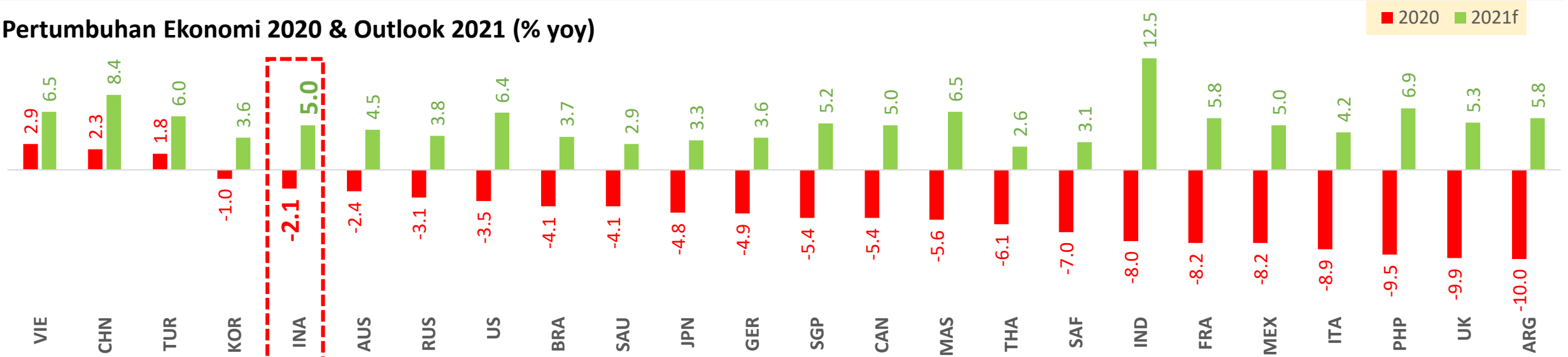
Defisit & Perubahan Utang Publik 2020 (% thd PDB)

Sumber: IMF WEO database & Kemenkeu RI, diolah

Cat: angka dalam kurung () merupakan level utang publik negara tersebut 2020



Pertumbuhan Ekonomi 2020 & Outlook 2021 (% yoy)



2

ISU DAN TANTANGAN



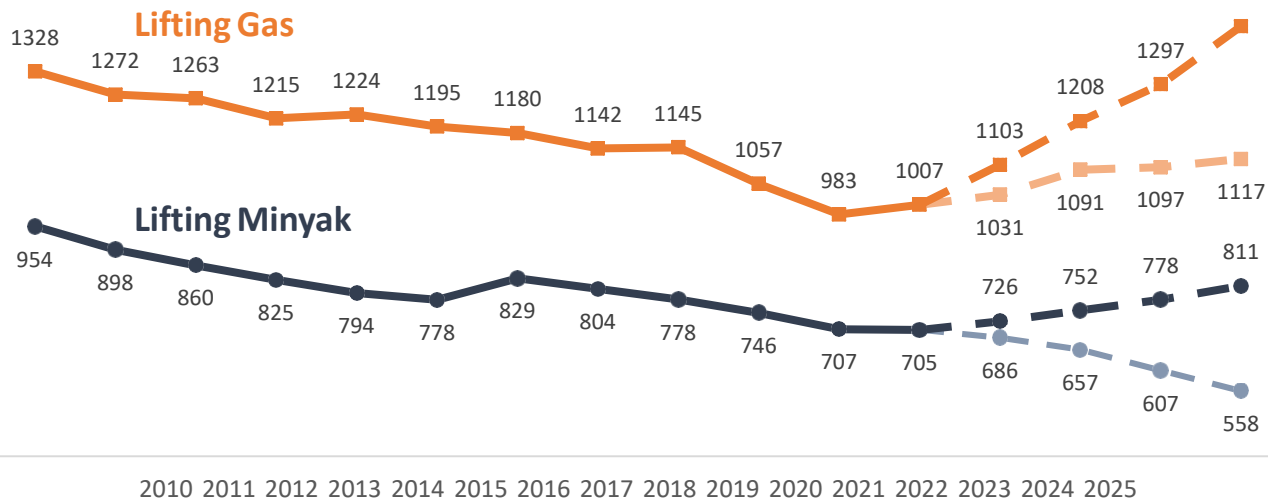


TREN PRODUKSI HULU MIGAS MENURUN, ICP BERGERAK FLUKTUATIF

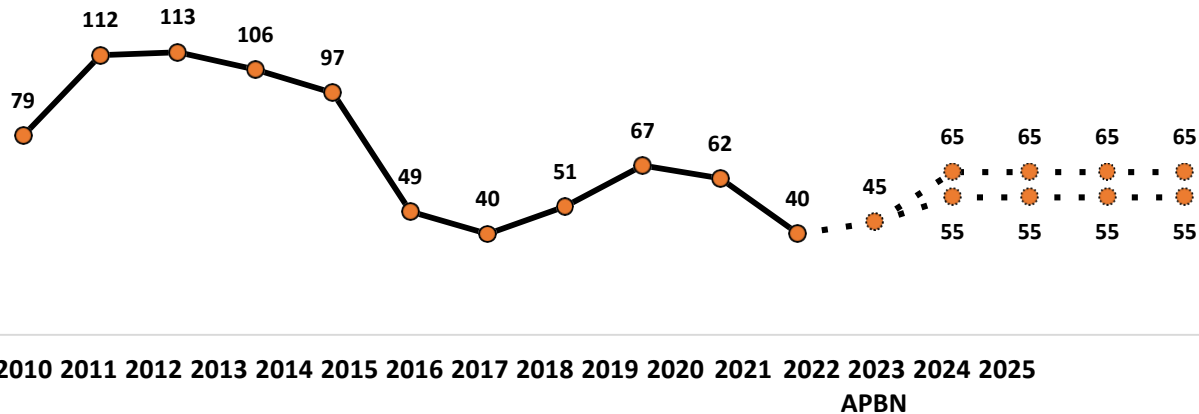
Di tahun 2022, ICP diproyeksikan dalam rentang US\$55 – US\$65 per barel



Perkembangan Lifting Migas
(Dalam Ribu Barel Setara Minyak Per Hari)



Perkembangan ICP (US\$/Barel)



Sumber: SKK Migas, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan (diolah)

● Realisasi ● Outlook

Sumber: SKK Migas, Kementerian ESDM, Kementerian Keuangan (diolah)

- Lifting Migas menunjukkan tren penurunan dalam satu dekade terakhir.
 - Produksi hulu migas masih mengandalkan sumur-sumur tua yang mengalami penurunan alamiah
 - Lifting gas relatif tinggi namun terkendala rendahnya serapan domestik akibat infrastruktur distribusi yang belum efisien
- Realisasi lifting migas 2020 mencatat penurunan terdampak pelemahan *demand* akibat pandemi
- Dalam jangka menengah, upaya peningkatan produksi hulu migas terus dilakukan dengan berbagai strategi, termasuk dengan perbaikan regulasi skema kontrak bagi hasil dan aspek kemudahan berusaha
- Pada tahun 2020, ICP di kisaran \$40, menurun tajam di awal pandemi didorong turunnya permintaan secara global, namun meningkat di akhir 2020.
- Dalam jangka menengah, harga minyak mentah diperkirakan bergerak relatif stabil di kisaran US\$55-65/barel dipengaruhi oleh faktor perbaikan permintaan dan kebijakan pengaturan produksi oleh OPEC+. Di sisi lain, perkembangan pesat energi alternatif menahan kenaikan harga.



KONSOLIDASI FISKAL HARUS DISERTAI REFORMASI FISKAL UNTUK MENJAGA KEBERLANJUTAN FISKAL DAN STABILITAS EKONOMI JANGKA MENENGAH-PANJANG

1

Peningkatan Pendapatan

- Reformasi Perpajakan yang sehat, adil, dan kompetitif, a.l:
 - ✓ Inovasi penggalan potensi untuk peningkatan *tax ratio*
 - ✓ Perluasan basis perpajakan (al. *e-commerce*, cukai plastik, optimalisasi tarif PPN)
 - ✓ Sistem perpajakan yang sejalan dengan struktur perekonomian
- Optimalisasi pengelolaan aset dan inovasi layanan
- Penguatan tata kelola dan proses bisnis
- penyempurnaan kebijakan dan penggalan potensi

2

Penguatan *spending better*

- Penerapan *zero based budgeting*:
 - ✓ Efisiensi belanja kebutuhan dasar
 - ✓ Fokus program prioritas
 - ✓ Berorientasi pada hasil (*result based*)
 - ✓ Daya tahan (*automatic stabilizer*)
- Subsidi yang tepat sasaran dan terintegrasi
- Efektivitas perlintas (akurasi data dan integrasi atau sinergi program)
- Penguatan desentralisasi fiskal untuk peningkatan kemandirian, sinergi dan keadilan
- Penguatan *Quality control* TKDD

3

Pembiayaan inovatif & sustainable

- Utang sebagai instrumen untuk *countercyclical* namun dikelola secara *prudent* dan *sustainable*
- Mendorong efektivitas pembiayaan investasi a.l pemberian PMN ke BUMN dilakukan secara selektif
- Pendalaman pasar (*financial deepening*)
- Inovasi pembiayaan dengan penguatan peran SWF dan SMV serta skema KPBU;
- Penguatan manajemen kas untuk menjaga *fiscal buffer* yang handal dan efisien



3

Penguatan Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah



PERKEMBANGAN TKDD SEBAGAI SUMBER PENDANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

TKDD telah meningkat secara signifikan dari hanya **Rp33.1 T di tahun 2000** menjadi **Rp795.5 T di tahun 2021**.



Mekanisme :

Harapan :

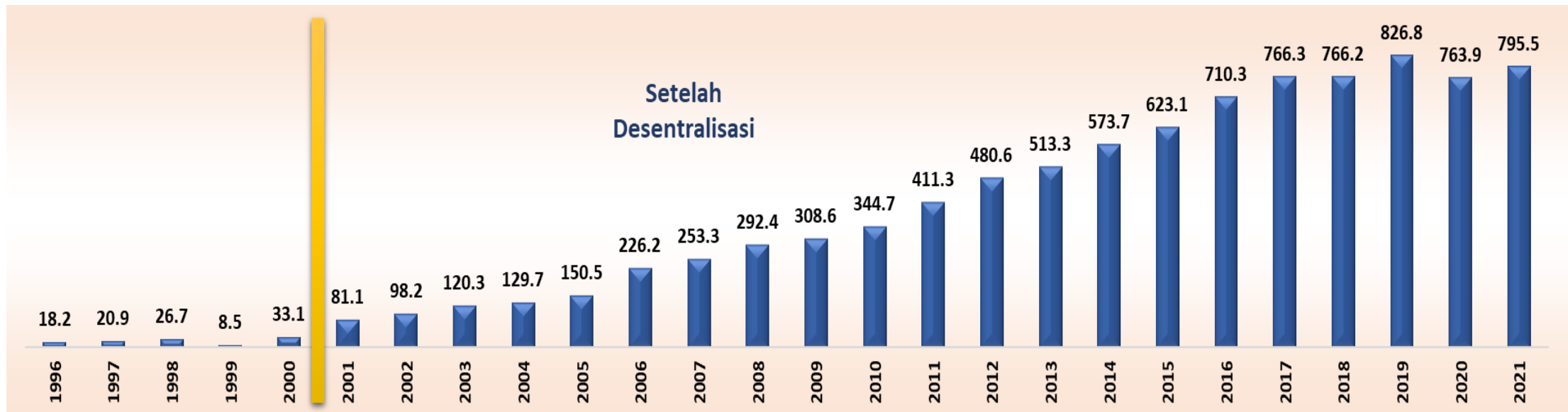
Alokasi Transfer ke Daerah telah **mencapai $\pm 1/3$ APBN** dalam rangka **mendukung pelaksanaan pembangunan daerah** oleh Entitas yang lebih dekat dan lebih memahami kebutuhan masyarakatnya



Mengurangi Kesenjangan Fiskal antara Pemerintah dan pemerintahan Daerah dan antar-Pemerintahan Daerah
(Pasal 3 ayat (2) UU 33/2004)



Memicu percepatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah

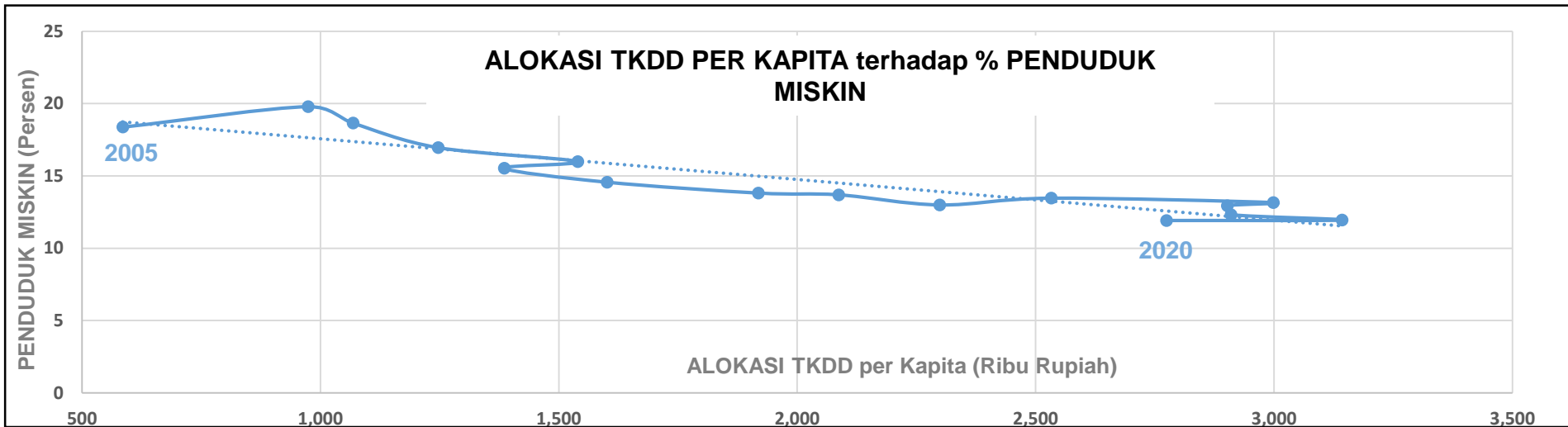




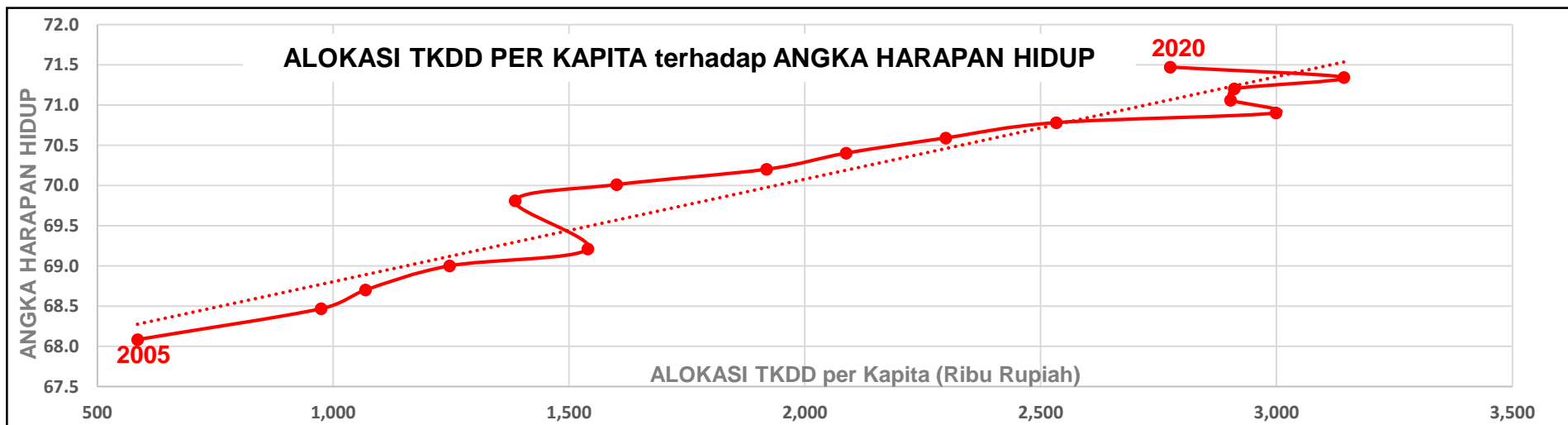
ALOKASI TKDD PERKAPITA TERHADAP INDIKATOR EKONOMI 2005 – 2020

(% Penduduk Miskin, Angka Harapan Hidup)

Alokasi TKDD per kapita berkorelasi positif terhadap penurunan % Penduduk Miskin dan Peningkatan Angka Harapan Hidup



- ❖ Terdapat korelasi positif antara kenaikan alokasi TKDD per kapita tahun 2005 s.d. 2020 dengan perubahan indikator kemiskinan dan angka harapan hidup.
- ❖ Semakin besar alokasi TKDD per kapita, maka terjadi penurunan persentase penduduk miskin, dan kenaikan angka harapan hidup.

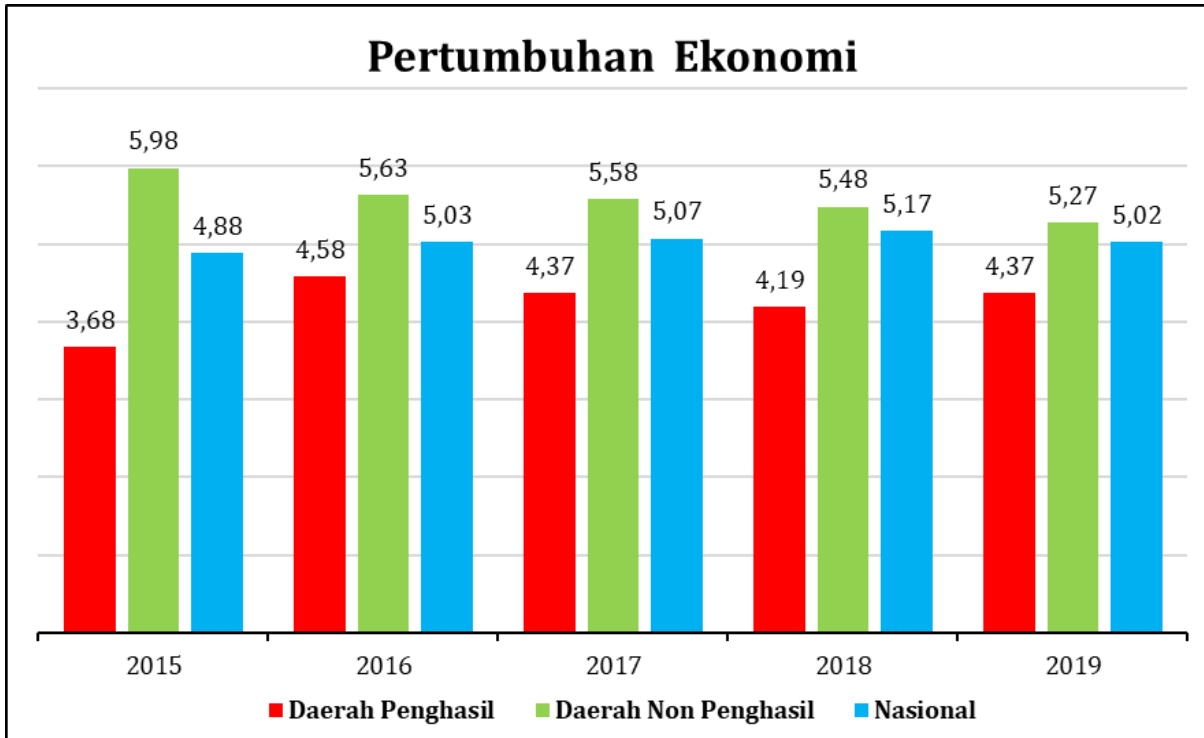




PERTUMBUHAN EKONOMI DAN INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DAERAH PENGHASIL MIGAS DAN DAERAH NON PENGHASIL MIGAS TAHUN 2015-2019



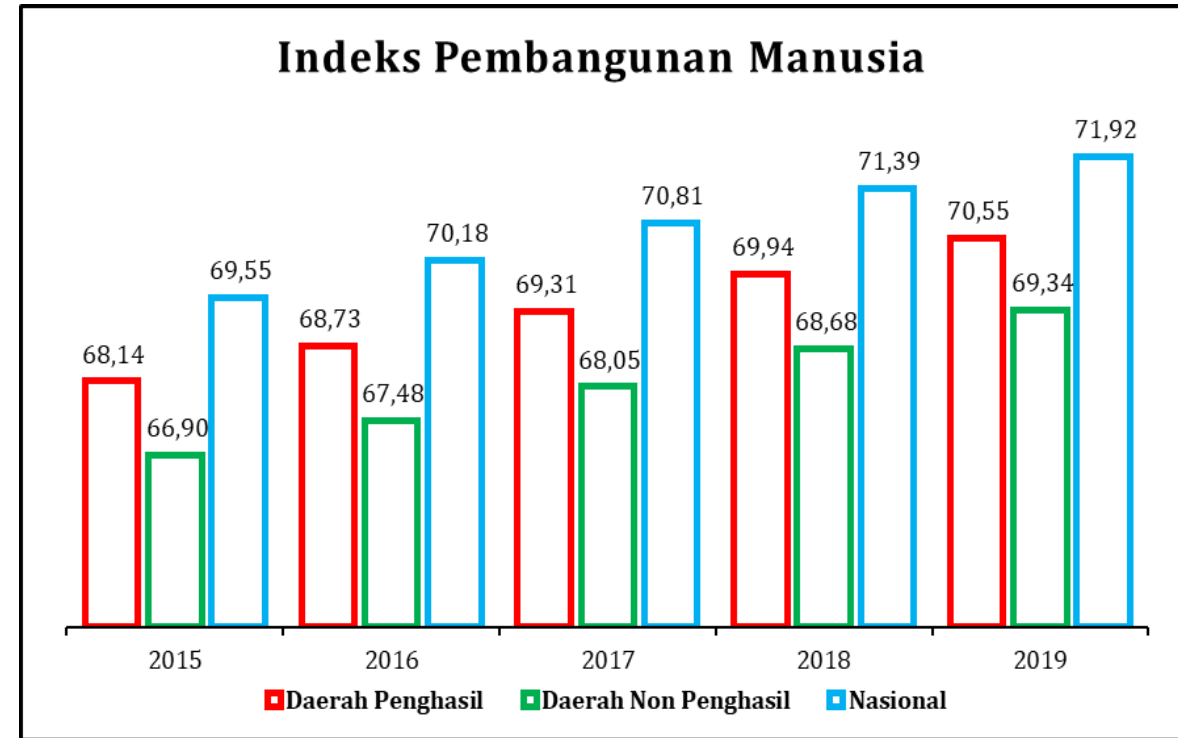
Pertumbuhan Ekonomi



Sumber : BPS

- Persentase rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah penghasil migas lebih rendah dari rata-rata daerah non penghasil migas maupun rata-rata nasional,
- Persentase rata-rata pertumbuhan ekonomi daerah non penghasil migas lebih tinggi dari rata-rata nasional.

Indeks Pembangunan Manusia



Sumber : BPS

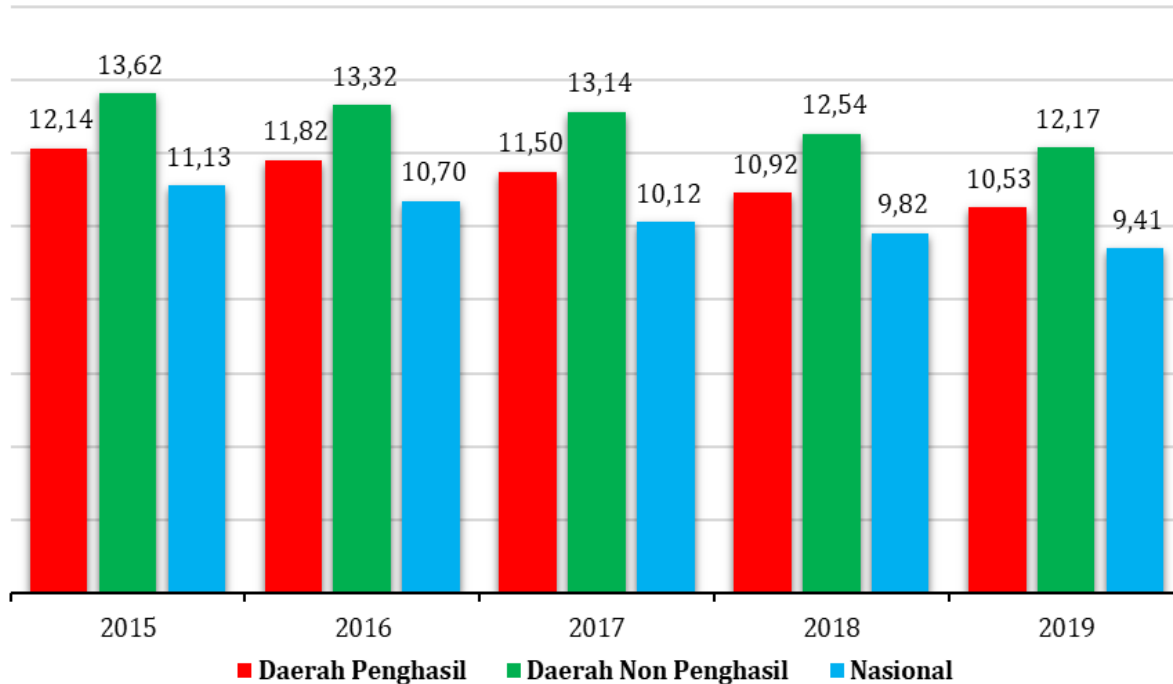
- Persentase rata-rata IPM daerah penghasil migas lebih rendah dari rata-rata nasional, tapi lebih tinggi dari rata-rata daerah non penghasil migas.



KEMISKINAN DAN PENGANGGURAN DAERAH PENGHASIL MIGAS DAN DAERAH NON PENGHASIL MIGAS TAHUN 2015-2019



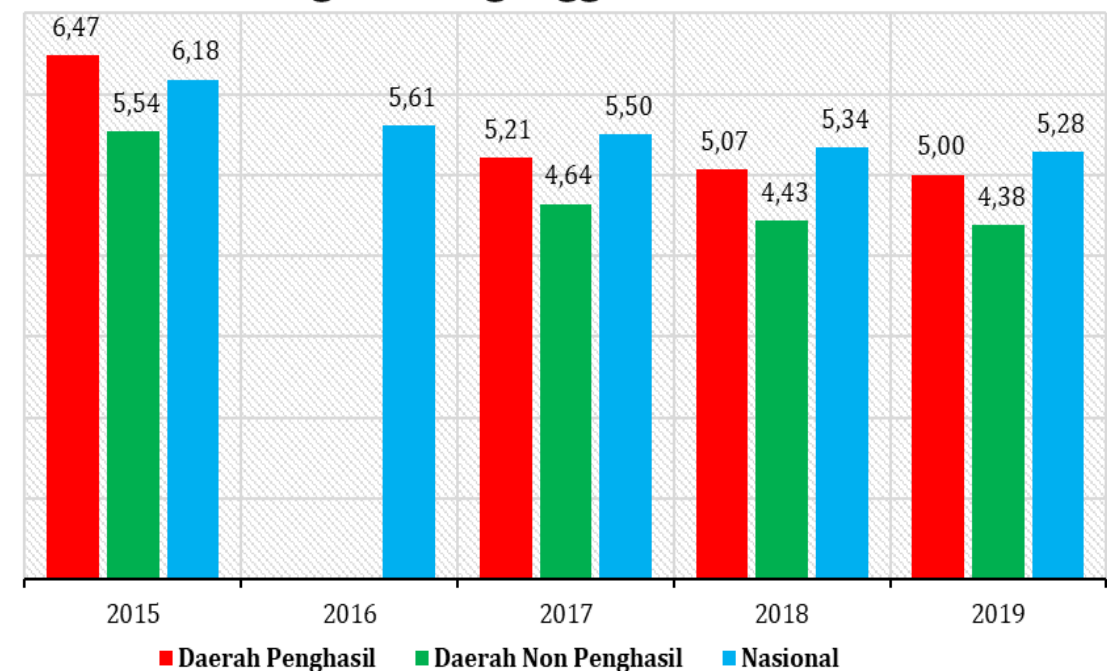
Persentase Penduduk Miskin



Sumber : BPS (Susesnas Bulan)

- Persentase rata-rata penduduk miskin daerah penghasil migas lebih rendah dari rata-rata daerah non penghasil migas.
- Persentase rata-rata penduduk miskin daerah penghasil migas lebih rendah dari rata-rata nasional.

Tingkat Pengangguran Terbuka



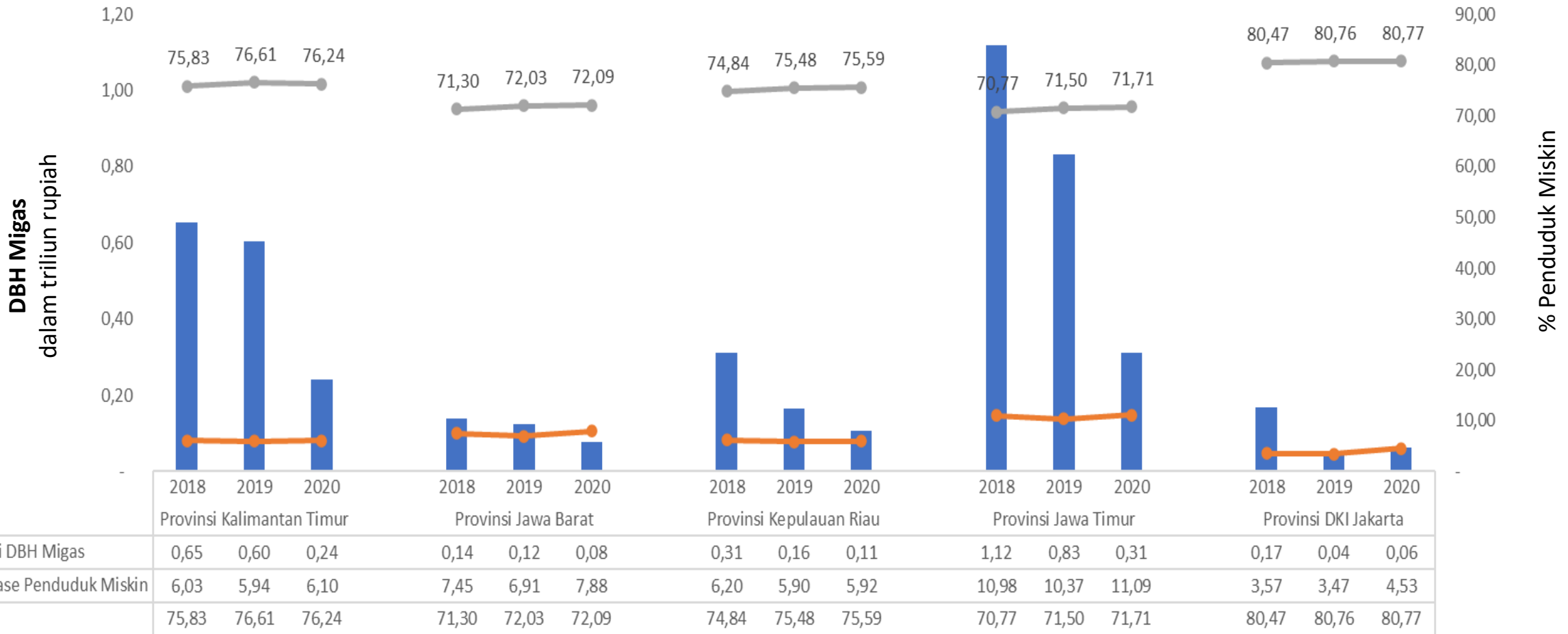
Sumber : BPS (Sakernas Bulan Agustus)

Tahun 2016, BPS tidak menyajikan TPT per kab/kota hanya untuk provinsi

- Persentase rata-rata tingkat pengangguran terbuka daerah penghasil migas lebih tinggi dari rata-rata daerah non penghasil migas.
- Persentase rata-rata tingkat pengangguran terbuka daerah penghasil migas lebih rendah dari rata-rata nasional, kecuali tahun 2015.



PERKEMBANGAN TINGKAT KEMISKINAN DAN IPM 5 PROVINSI PENGHASIL DBH MIGAS TERBESAR 2018-2020



- Rata-rata tingkat kemiskinan nasional yaitu 7,99% (2018) , 7,48 % (2019) , dan 10,19% (2020). Dibandingkan angka nasional, umumnya provinsi penghasil migas terbesar memiliki tingkat kemiskinan yang lebih rendah, kecuali Prov. Jawa Timur.



TANTANGAN PELAKSANAAN DESENTRALISASI FISKAL

Pengelolaan APBD belum efisien, efektif, dan produktif

- Banyaknya program dan kegiatan (program: 26.140, kegiatan: 298.267)
- Belanja belum efisien (34% bel. peg; 24% bel. barjas; 18% bel. modal)
- Standar harga di daerah yang bervariasi dan tinggi (a.l. biaya rapat dan konsinyering 23-68% > Pusat, uang harian 50% > Pusat, honorarium 16-30% > Pusat)
- Pola penyerapan belanja masih *business as usual* (tinggi di Tw IV)
- Dana Pemda diperbankan masih tinggi Rp194.54 T (April 2021)
- Pembiayaan kreatif belum dimanfaatkan (Rp124 M (APBD 2021))
- Akuntabilitas masih perlu ditingkatkan (Smt 1 2020: 6.217 temuan)

APBD belum berperan optimal dalam mendukung Pusat untuk stabilisasi Fiskal

- Realisasi belanja untuk penanganan Covid-19 & pemulihan ekonomi daerah belum optimal (Kesehatan 66,4%, Perlinsos 67,6%, pemulihan ekonomi 53,3%)
- Rendahnya awareness daerah untuk menyusun kebijakan *countercyclical*

Kesenjangan pembangunan



- Korelasi antara input dan **output masih lemah**
- Korelasi antara **output** daerah dengan **output dan outcome nasional lemah**
- Kontribusi **Jawa masih tinggi** dalam perekonomian (59%)
- Penurunan **stunting masih belum tajam**: 30.80% (2018) menjadi 27.67% (2019)
- **Ketimpangan layanan publik**, a.l.:

Imunisasi Dasar Lengkap



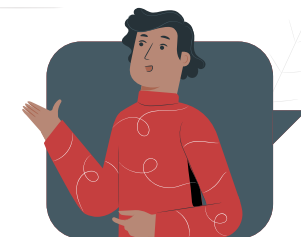
- Nasional 92,96%
- Tertinggi 100% (NTB)
- Terendah 49,64% (Aceh)

APM SMP



- Nasional 79,40%
- Tertinggi 86,75% (Bali)
- Terendah 57,19% (Papua)

Produktivitas, output PDB, dan Daya Saing belum optimal untuk mewujudkan visi INDONESIA MAJU



Pelaksanaan desentralisasi fiskal telah melahirkan **beberapa daerah yang berkinerja baik dan inovatif** dalam penguatan pelayanan publik. Namun, **masih banyak daerah yang perlu ditingkatkan kinerjanya** agar pemerataan pelayanan masyarakat dapat segera terwujud.

CAPAIAN OUTPUT



APM SMP/SMA

Capaian Tertinggi

- Kab. Humbang Hasundutan (89,73%)
- Kota Metro (88,39%)
- Kota Bima (88,33%)

Capaian Terendah

- Kab. Intan Jaya (13,58%)
- Kab. Sintang (49,28%)
- Kab. Kep. Mentawai (50,34%)

Nasional 69,52%



AIR MINUM LAYAK

Capaian Tertinggi*

- Kota Magelang (100,00%)
- Kota Tegal (100,00%)
- Kab. Klaten (100,00%)

Capaian Terendah

- Kab. Lanny Jaya (1,06%)
- Kab. Mamasa (22,91%)
- Kab. Tulang Bawang Barat (27,4%)

Nasional 89,27%

**terdapat 7 Pemda dengan capaian 100%*



IMUNISASI LENGKAP

Capaian Tertinggi

- Kota Salatiga (81,88%)
- Kab. Blitar (80,24%)
- Kota Surakarta (77,59%)

Capaian Terendah

- Kab. Puncak (0,53%)
- Kab. Aceh Utara (2,18%)
- Kab. Aceh Tenggara (7,51%)

Nasional 47,21%

**(BCG, DPT, Polio, Campak)*

CAPAIAN OUTCOME



INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Capaian Tertinggi

- Kota Yogyakarta (86,65%)
- Kota Banda Aceh (85,07%)
- Kab. Sleman (83,85%)

Capaian Terendah

- Kab. Nduga (30,75%)
- Kab. Sabu Raijua (56,66%)
- Kab. Malaka (60,34%)

Nasional 71,92%



PENDUDUK MISKIN

Capaian Tertinggi

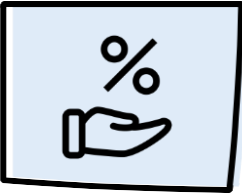
- Kota Tangerang Selatan (1,68%)
- Kab. Badung (1,78%)
- Kota Depok (2,07%)

Capaian Terendah

- Kab. Deiyai (43,65%)
- Kab. Sumba Tengah (34,62%)
- Kab. Teluk Bintuni (30,57%)

Nasional 11,95%

Badan Pusat Statistik, Capaian Tahun 2019



PENINGKATAN KUALITAS BELANJA

Porsi belanja Belanja Pegawai masih tinggi (32,4% APBD), porsi belanja produktif (al Infrastruktur) dan layanan publik masih relative rendah sehingga multiplier efek kurang optimal



PENGUATAN TATA KELOLA APBD

- Akuntabilitas dalam pengelolaan APBD secara administrative membaik namun secara substansi perlu diperkuat;
- Tata kelola APBD yang belum efisien dan disiplin sehingga belum optimal untuk percepatan pemerataan pelayanan



PENINGKATAN AKSES PEMBIAYAAN

Daerah belum mengoptimalkan akses pembiayaan alternatif untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah



PENGUATAN SINERGI PUSAT DAN DAERAH

Sinergi dan harmonisasi gerak langkah APBN dan APBD perlu untuk diperkuat dalam mewujudkan tujuan bernegara



KONDISI KEUANGAN DAERAH DAN UPAYA PERBAIKAN

Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan Daerah Perlu Menjadi Prioritas



01

Belanja Daerah masih rendah

Realisasi belanja s.d April 2021 dari sebesar Rp143,89 T (12,7% dari APBD). Pada April 2020 terealisasi 15,9% dari APBD 2020

02

Simpanan Pemda masih tinggi

Simpanan pemerintah daerah cukup tinggi (Rp 194,54 triliun) dan cenderung mengalami kenaikan sejak awal tahun 2021.

03

APBD belum optimal

Kondisi ini mengindikasikan bahwa pendapatan daerah, baik yang bersumber dari TKDD maupun sumber pendapatan lainnya, belum digunakan secara optimal.

TKDD sebagai sumber pendapatan utama bagi pemerintah daerah **perlu menjadi instrumen untuk mendorong peningkatan kualitas pengelolaan daerah.**

Saat ini Pemerintah tengah menyusun **RUU tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah (RUU HKPD)** yang merupakan penyempurnaan dari UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan daerah.

RUU HKPD bertujuan untuk **mengakselerasi perbaikan dan pemerataan layanan publik di seluruh pelosok NKRI** melalui pengalokasian sumber daya nasional yang lebih efisien, transparan, akuntabel dan berkeadilan.

Pokok pengaturan RUU HKPD, antara lain:

- perpajakan daerah yang mendukung **kemudahan berusaha,**
- Transfer Ke Daerah yang **berbasis kinerja,**
- tata kelola belanja daerah secara **efisien dan disiplin,**
- pembiayaan daerah yang **terkendali,** dan
- sinergi kebijakan fiskal** antara pemerintah dan pemerintah daerah untuk mewujudkan tujuan bernegara.





PENGUATAN KUALITAS DESENTRALISASI FISKAL MELALUI REFORMASI HUBUNGAN KEUANGAN PUSAT DAN DAERAH (HKPD)



Reformasi HKPD ditujukan untuk **menciptakan alokasi sumber daya nasional yang efisien** melalui HKPD yang **transparan, akuntabel, dan berkeadilan**, guna mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat di seluruh pelosok NKRI



Mengembangkan **sistem pajak daerah** yang mendukung alokasi sumber daya nasional yang efisien

Mengembangkan **HKPD** dalam **meminimumkan ketimpangan** vertikal dan horizontal

Mendorong peningkatan **kualitas belanja daerah** melalui kebijakan transfer ke daerah (TKD)

Harmonisasi belanja pusat dan daerah untuk penyelenggaraan layanan publik yang optimal dan menjaga **kesinambungan fiskal**

- Penguatan PDRD melalui sumber perpajakan daerah baru dan opsen perpajakan daerah antara Provinsi dan Kab/Kota
- Penghapusan retribusi layanan wajib
- Dukungan kemudahan berusaha

- Redesain TKD: mengurangi ketimpangan, memperkuat tata kelola dan kinerja layanan.
- Perluasan skema pembiayaan daerah untuk pembangunan infrastruktur.
- Penerapan skema sinergi pendanaan agar fokus pada penyelesaian program strategis.

- Pengelolaan TKD berbasis kinerja
- TKD digunakan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan publik
- Pengendalian disiplin belanja daerah
- Pemantauan dan evaluasi terhadap input, proses, output, dan *outcome*

- Penyelarasan kebijakan fiskal Pusat dan Daerah
- *Sharing responsibility* Pusat dan Daerah melalui desain TKD yang dapat berfungsi sebagai *counter-cyclical policy*
- Pengendalian defisit APBD
- *Refocusing* APBD dalam kondisi tertentu
- Penguatan sistem informasi fiskal Pusat dan Daerah



TERIMA KASIH